

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENUNTASAN  
KEMISKINAN DI KOTA BANJAR*****IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT POLICIES IN POVERTY  
ALLEVIATION IN THE CITY OF BANJAR*****Nana Suryana<sup>1</sup>, Yat Rospia Brata<sup>2</sup>, Dewi Mulyanti<sup>3</sup>**

Received: May 2022

Accepted: June 2022

Published: July 2022

**Abstrak**

Upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga peran pemerintah daerah dalam percepatan pengentasan kemiskinan. Salah satu cara pemerintah daerah dapat mendukung upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan menjadikan kemiskinan sebagai agenda utama kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang deskriptif analisis. teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha yang terus dilakukan oleh pemerintah Kota Banjar hal ini dibuktikan dengan penurunan angka kemiskinan dari tahun 2018 ke tahun 2019 dimana jumlah penduduk miskin yang tadinya 10.41 (ribu jiwa) menjadi 10.07 (ribu jiwa). Pemerintah Kota Banjar berperan penting dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang ada. Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Banjar, yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat penerima manfaat. Upaya yang dapat ditempuh dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam penuntasan kemiskinan Di Kota Banjar diantaranya yang pertama menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan usaha kecil di masyarakat, termasuk pengaturan dan perlindungan usaha. melalui pengembangan UKM. Yang kedua, mengakomodir program dan kegiatan dengan memaksimalkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kewenangan. Dukungan dari berbagai OPD berdampak besar pada implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjar untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

**Kata kunci:** Implementasi, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak.

**Abstract**

*Poverty alleviation efforts are not only the responsibility of the central government, but also the role of local governments in accelerating poverty alleviation. One way that local governments can support poverty reduction efforts is by making poverty the main policy agenda. This study uses a descriptive qualitative method of analysis. While the data analysis used the interactive model of Miles and Huberman, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that the efforts that the Banjar City government continues to make are evidenced by the decrease in the poverty rate from 2018 to 2019 where the number of poor people from 10.41 (thousand people) became 10.07 (thousands). The Banjar City Government plays an important role in implementing existing poverty reduction policies. Poverty Reduction Program in Banjar City, which aims to empower beneficiary communities. Efforts that can be taken in implementing government policies in alleviating poverty in Banjar City include the first to create a conducive environment for the development of small businesses in the community, including business regulation and protection. through SME development. The second is to accommodate programs and activities by maximizing the Regional Apparatus Organizations (OPD) that have the authority. Support from various OPDs has had a major impact on the implementation of the Banjar City Poverty Reduction Policy to achieve its goals effectively and efficiently.*

**Keywords:** : implementation, policy, government, poverty.

<sup>1</sup> Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : [mhsnanasuryana@gmail.com](mailto:mhsnanasuryana@gmail.com) [miwanciamis2005@gmail.com](mailto:miwanciamis2005@gmail.com)

<sup>2</sup> Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : [yatrospia@unigal.ac.id](mailto:yatrospia@unigal.ac.id),

<sup>3</sup> Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : [dewimulyantiunigal@gmail.com](mailto:dewimulyantiunigal@gmail.com)

## I. PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan adalah masalah klasik. Pertanyaan mendasar di negara-negara miskin bukan hanya bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan, tetapi juga siapa yang menumbuhkan ekonomi nasional, sedikit atau banyak. Ketika pertumbuhan didorong terutama oleh orang kaya, mereka akan mendapat manfaat paling besar dari pertumbuhan, sementara kemiskinan dan distribusi pendapatan memburuk. Kuncoro mengatakan dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Pembangunan bila pertumbuhan disumbang oleh banyak orang, maka buah dari pertumbuhan ekonomi akan dirasakan secara lebih merata (Kuncoro, 2006).

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat sulit untuk diatasi, terutama bagi negara berkembang. Kemiskinan pada negara berkembang merupakan masalah yang cukup rumit meskipun beberapa negara berkembang telah berhasil melaksanakan pembangunan dalam hal produksi dan pendapatan nasional. Kondisi kemiskinan suatu negara atau daerah juga merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara atau daerah tersebut.

Kemiskinan juga memunculkan masalah baru seperti kebodohan, pengangguran, kelaparan, kesenjangan sosial, kesehatan, serta kriminalitas. Agar kemiskinan tidak semakin parah, pemerintah harus mengutamakan kemiskinan, beberapa ahli mengatakan bahwa cara yang paling tepat untuk memerangi kemiskinan adalah dengan menciptakan kegiatan ekonomi di daerah untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator terpenting untuk mengevaluasi kinerja suatu perekonomian, khususnya untuk menganalisis hasil perkembangan ekonomi suatu negara atau wilayah. Perekonomian harus tumbuh ketika produksi barang dan jasa meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan, maka itu menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik (Romi, 2018).

Kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan. Oleh sebab itu keseimbangan antara pertumbuhan dengan pemerataan dan seberapa besar peningkatan kesejahteraan masyarakat selalu dipertanyakan bila ingin mengetahui keberhasilan pembangunan.

Program Penanggulangan Kemiskinan disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; dan
4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah menyadari pentingnya pengentasan kemiskinan bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara maka pemerintah menempatkan pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama. Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) 2005-2025 dan sejalan dengan Kesepakatan Global untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk mengakhiri kemiskinan pada tahun 2030.

Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 11,200 penduduk miskin di Kota Banjar, angka ini naik dibandingkan dengan tahun 2019 yang masih berada pada angka 10,070 penduduk miskin. Dengan kata lain, Kota Banjar belum berhasil menurunkan angka penduduk miskin dalam jangka waktu satu tahun terakhir, berikut beberapa permasalahan naiknya kemiskinan di Kota Banjar diantaranya: pertama, pandemik yang disebabkan oleh Virus Covid-19, dimana hal ini mengakibatkan beberapa orang kehilangan pekerjaan karena diberhentikan dari pekerjaannya (PHK), kedua, program dan kegiatan penanganan masalah kemiskinan di Kota Banjar tidak sinergis antara satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan OPD yang lain, dan ketiga, penanganan kemiskinan belum menjadi prioritas penanganan.

Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi peran pemerintah daerah juga sangat berpengaruh dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Salah satu cara pemerintah daerah dapat mendukung upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan menjadikan kemiskinan sebagai agenda politik utama. Untuk itu perlu dirumuskan masalah

kemiskinan yang lebih luas di setiap daerah. Rumusan masalah tersebut kemudian dapat dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen kebijakan strategis di daerah, yaitu Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). SPKD ini diharapkan menjadi salah satu cara yang tepat untuk memenuhi peran daerah dalam penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik mengangkat permasalahan dengan judul: **“Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penuntasan Kemiskinan Di Kota Banjar”**.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu suatu teknik penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan secara umum fakta-fakta yang ditemukan, kemudian dianalisis serta berdasarkan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti, dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang sedang diteliti serta berdasarkan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti, dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang sedang diteliti.

Metode deskriptif analisis dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya (Nawawi, 2001).

Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Sedangkan analisis data menggunakan model interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2012; Moleong, 2006; Sugiyono, 2017).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sasaran utama dalam peningkatan ekonomi adalah masyarakat miskin. Keberpihakan pemerintah, khususnya pada yang kurang mampu sangat diperlukan. Keberpihakan ini merupakan langkah strategis yang manusiawi sebagai wujud nyata dari kewajiban luhur untuk memenuhi tuntutan rakyat yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah. Dalam hal ini berbagai usaha terus dilakukan oleh pemerintah terutama pemerintah Kota Banjar untuk menekan angka kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai program yang menjadi prioritas pembangunan

untuk menanggulangi kemiskinan dan melayani masyarakat setempat.

Saat ini, pada era Presiden Joko Widodo, tengah berjalan tujuh program untuk mengurangi kemiskinan Presiden menyampaikan bahwa saat ini intervensi dari kementerian atau lembaga dari sisi program juga semuanya menasar, baik yang berkaitan dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu sembako.

Untuk itu, pemerintah berperan penting dalam melaksanakan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan yang ada. Fungsi pemerintah Indonesia yang meliputi fungsi pengaturan, pemeliharaan, pemberdayaan, dan pembangunan adalah: Pelaksanaan fungsi pengaturan, yang biasa disebut dengan segala bentuk fungsi pengaturan, dimaksudkan selain untuk menciptakan kondisi sosial yang baik, sebagai upaya untuk menciptakan kondisi yang tepat agar lebih kondusif bagi berbagai kegiatan semua strata. ketertiban dalam berbagai kehidupan sosial. Fungsi pelayanan akan bermuara pada keadilan sosial. Fungsi pemberdayaan memberikan kontribusi terhadap kemandirian masyarakat, dan fungsi pembangunan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, capaian pembangunan dan penguatan yang dilakukan oleh pemerintah dan regulasi pemerintah menuntut masyarakat setempat untuk secara bertahap dan sukarela mencukupi kebutuhan mereka.

Sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden dalam Rapat Terbatas Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan pada tanggal 4 Maret 2021, agar kemiskinan ekstrem (*extreme poverty*) pada 2024 dapat mencapai 0%, maka diperlukan upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem yang harus dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi, serta upaya validasi data dan mempertajam basis data untuk mencapai ketepatan target dan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Pada tahun 2021 ini upaya pengentasan kemiskinan ekstrem difokuskan pada 7 Provinsi dan diprioritaskan pada 35 Kabupaten yang telah mewakili 20 persen jumlah penduduk miskin secara nasional yang berjumlah 10,4 juta jiwa, yang berarti pada tahun 2021 ini akan mensasar 2,1 juta jiwa atau 899 ribu rumah tangga. Ketujuh provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

Kota Banjar berada di posisi *middle* dengan presentase penduduk miskin kurang dari 10 persen. Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 8,59,5% pada tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) pemerintah. Untuk itu, perlu pemerintah daerah Banjar merumuskan permasalahan kemiskinan yang lebih kompleks di setiap daerah, rumusan masalah tersebut dilakukan dengan menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD). SKPD ini diharapkan menjadi salah satu cara yang tepat bagi daerah untuk berperan dalam pengentasan kemiskinan. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjar sebagai berikut:

1. Menciptakan Lingkungan yang Kondusif bagi Perkembangan Usaha Kecil di Masyarakat Termasuk Pengaturan dan Perlindungan Usaha

Penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan UKM memiliki potensi yang cukup baik. Sektor UKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, lebih dari 99,45% tenaga kerja. Namun demikian, untuk kontribusinya terhadap PDB masih sekitar 30%. Upaya pengembangan sektor UKMK juga dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja yang bekerja di sektor tersebut. Kemajuan dalam UKM akan memungkinkan lebih banyak pekerja yang ada untuk dipekerjakan, sehingga menurunkan tingkat pengangguran.

2. Mengakomodir Program dan Kegiatan dengan Memaksimalkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Memiliki Kewenangan

Hal ini terlihat pada OPD-OPD teknis yang sekaligus melakukan program kerja yang fokus pada isu pengentasan kemiskinan. Misalnya Dinas Pekerjaan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki program kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni, penanganan kawasan kumuh perkotaan dan program rumah sehat, termasuk sanitasi lingkungannya, Dinas Lingkungan Hidup memiliki Program yang mendukung pengentasan masalah perkotaan kumuh melalui program persampahan, dan Lingkungan Hidup. Dinas Kesehatan memiliki program Kesehatan Lingkungan, Dinas Pendidikan memiliki program peningkatan sumberdaya yang ditujukan ke masyarakat miskin perkotaan, Dinas Sosial mempunyai program Pengentasan kemiskinan melalui RASTRA, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Dinas Pemberdayaan Perempuan memiliki program pemberdayaan perempuan melalui pemberdayaan perempuan, dan Dinas Kesejahteraan Sosial Setda Kota Banjar melalui Program Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Banjar.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Setelah diperoleh hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penuntasan Kemiskinan Di Kota Banjar, selanjutnya dapat disimpulkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut sebagai berikut: segala usaha yang terus dilakukan oleh pemerintah Kota Banjar hal ini dibuktikan dengan penurunan angka kemiskinan dari tahun 2018 ke tahun 2019 dimana jumlah penduduk miskin yang tadinya 10.41 (ribu jiwa) menjadi 10.07 (ribu jiwa). Pemerintah Kota Banjar berperan penting dalam mengimplementasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang ada. Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Banjar, yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat penerima manfaat.

Presiden Joko Widodo melalui nawa citanya, pemerintah akan meningkatkan produktivitas kesejahteraan melalui program-program yang langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat. Salah satu bentuk program tersebut adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu sembako.

Upaya yang dapat ditempuh dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam penuntasan kemiskinan Di Kota Banjar diantaranya sebagai berikut: menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan usaha kecil di masyarakat, termasuk pengaturan dan perlindungan usaha. Penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan UKM memiliki potensi yang cukup baik. Sektor UKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, lebih dari 99,45% tenaga kerja. Namun demikian, untuk kontribusinya terhadap PDB masih sekitar 30%. Upaya pengembangan sektor UKMK juga dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja yang bekerja di sektor tersebut. Kemajuan dalam UKM akan memungkinkan lebih banyak pekerja yang ada untuk dipekerjakan, sehingga menurunkan tingkat pengangguran. Upaya yang lain yaitu mengakomodir program dan kegiatan dengan memaksimalkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kewenangan. Dukungan dari berbagai OPD berdampak besar pada implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kota Banjar untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

**B. Saran**

Bagi pengembangan akademik dan peningkatan ilmu pengetahuan, sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut bagi peningkatan ilmu administrasi publik yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan dalam konteks lokus dan masalah yang berbeda, terutama faktor-faktor lain yang berpengaruh di luar faktor yang dibahas dalam penelitian ini. Selama ini belum adanya kebijakan Penanganan kemiskinan (berbentuk peraturan daerah) dan frekuensi implementasi kebijakan penanganan kemiskinan yang relatif tinggi yang membuat kebijakan pengentasan di wilayah Kota Banjar belum maksimal.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Kuncoro. Murdijat, 2006. *Ekonomi Pembangunan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Miles, M. B. & Huberman, M., 2012. *Analisis Data Kualitatif*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nawawi. Hadari, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*, Cetakan Keempat, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Romi, Syahrur, 2018. Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap Kemiskinan di Kota Jambi, *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah* Vol. 7. No.1.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

### Peraturan Perundang-Undangan:

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan Kemiskinan.*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*